

PENERAPAN PERSONA NON GRATA DALAM KRISIS DIPLOMATIK KANADA-INDIA 2023: ANALISIS HUKUM BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961

Maulana Jordan Al Fadhil¹, Naurah Qanith Dzakhirah², Adibio Ramadinov³, Ema Septaria⁴, M. Ilham Adepio⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : maulanajordan123@gmail.com¹, naurah.awa05@gmail.com², adibio3893@gmail.com³,
emaseptaria@unib.ac.id⁴, miadepio@unib.ac.id⁵

ABSTRAK

Krisis diplomatik antara Kanada dan India pada tahun 2023 memunculkan kembali urgensi analisis terhadap mekanisme *persona non grata* dalam hukum diplomatik internasional. Tuduhan pemerintah Kanada terkait keterlibatan agen India dalam pembunuhan aktivis Sikh di wilayah Kanada memicu aksi saling mengusir diplomat, yang dilakukan berdasarkan Pasal 9 Konvensi Wina 1961. Artikel ini menganalisis legalitas tindakan tersebut serta relevansi Pasal 41 dan 43 dalam konteks konflik ini. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa meskipun tindakan kedua negara sah secara hukum, terdapat indikasi kuat bahwa faktor politis turut mempengaruhi penerapannya. Artikel ini menyoroti bahwa norma hukum diplomatik seringkali dijalankan secara fleksibel dalam situasi geopolitik yang memanas.

Kata Kunci : *Persona non grata*, Konvensi Wina 1961, hubungan diplomatik, hukum internasional, Kanada-India.

ABSTRACT

The diplomatic crisis between Canada and India in 2023 reignited the urgency to examine the persona non grata mechanism under international diplomatic law. Canada's allegation of India's involvement in the killing of a Sikh separatist on Canadian soil led to the expulsion of diplomats from both countries, invoking Article 9 of the 1961 Vienna Convention. This article analyzes the legality of such actions and the relevance of Articles 41 and 43 within this conflict. Using a normative juridical approach and case study, the research finds that while both countries acted within the legal framework, political motives significantly influenced the application. The study highlights how diplomatic legal norms are often flexibly interpreted amid heightened geopolitical tensions.

Keywords : *Persona non grata*, Vienna Convention 1961, diplomatic relations, international law, Canada-India

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

LATAR BELAKANG

Hubungan diplomatik antarnegara merupakan fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Dalam sistem internasional modern, diplomasi menjadi instrumen vital untuk menjembatani perbedaan, merundingkan kesepakatan, serta mengelola konflik tanpa penggunaan kekerasan. Para diplomat, yang bertindak sebagai wakil resmi negara pengirim, harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas dari tekanan atau intimidasi negara penerima. Untuk itu, komunitas internasional mengkodifikasikan prinsip-prinsip hubungan diplomatik dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 1961)¹.

Konvensi Wina 1961 mengatur dengan rinci hak, kekebalan, dan kewajiban diplomat, serta kewajiban negara pengirim dan negara penerima dalam menjaga hubungan diplomatik. Salah satu prinsip sentral dalam Konvensi ini adalah konsep kekebalan diplomatik yang memastikan bahwa diplomat tidak tunduk pada yurisdiksi peradilan pidana atau perdata negara penerima. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan tekanan politis melalui instrumen hukum domestik terhadap diplomat asing. Namun, Konvensi ini juga memberikan mekanisme untuk menjaga keseimbangan kepentingan negara penerima, salah satunya melalui ketentuan Pasal 9, yang memperkenalkan konsep *persona non grata*.

Pasal 9 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa negara penerima memiliki hak untuk, kapan saja dan tanpa harus memberikan alasan, memberitahu negara pengirim bahwa seorang anggota misi diplomatik dinyatakan sebagai *persona non grata*. Akibatnya, diplomat tersebut harus ditarik kembali atau pengabdiannya dihentikan. Apabila negara pengirim tidak memenuhi permintaan ini dalam waktu yang wajar, negara penerima berhak untuk menolak pengakuan atas diplomat tersebut sebagai bagian dari misi diplomatik. Mekanisme ini menjadi instrumen hukum penting untuk menjaga kedaulatan negara penerima dan memastikan bahwa diplomat yang bertugas di wilayahnya tetap menghormati hukum dan norma setempat².

Dalam praktiknya, penggunaan mekanisme *persona non grata* seringkali tidak hanya didorong oleh pelanggaran hukum formal, tetapi juga oleh pertimbangan politis yang lebih luas. Salah satu kasus menonjol yang melibatkan penerapan *persona non grata* dalam konteks ketegangan politik dan keamanan adalah krisis diplomatik antara Kanada dan India pada tahun 2023. Kasus ini bermula dari tuduhan Kanada terhadap keterlibatan agen pemerintah India dalam pembunuhan seorang aktivis separatis Sikh, Hardeep Singh Nijjar, di wilayah Kanada. Tuduhan ini memicu ketegangan luar biasa antara kedua negara, yang berujung pada saling mengusir diplomat senior masing-masing negara dengan mendeklarasikan mereka sebagai *persona non grata*.

Pada bulan September 2023, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, secara terbuka mengemukakan bahwa terdapat "indikasi kredibel" mengenai keterlibatan agen India dalam pembunuhan Nijjar. Dalam respons terhadap situasi ini, Kanada memutuskan untuk mengusir seorang diplomat senior India yang dituduh sebagai kepala operasi intelijen di Kanada. Tidak lama berselang, India membalas dengan mengusir seorang diplomat senior Kanada di New Delhi.

¹ United Nations, *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, United Nations Treaty Series, vol. 500 (1961): 95–130.

² Ibid., 135

Tindakan saling mengusir ini bukan hanya mencerminkan memburuknya hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga membuka ruang untuk analisis tentang bagaimana hukum internasional, khususnya Konvensi Wina 1961, dijalankan atau mungkin dilanggar. Kasus Kanada-India 2023 ini menarik untuk dikaji secara hukum karena menyoroti penerapan prinsip *persona non grata* dalam situasi yang sarat dengan ketegangan politik dan dugaan keterlibatan dalam tindakan kriminal lintas batas. Dari sudut pandang hukum internasional, penting untuk mengevaluasi apakah langkah-langkah yang diambil kedua negara tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh Konvensi Wina 1961, atau justru menunjukkan penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati bersama³.

Analisis terhadap kasus ini juga penting untuk memahami bagaimana pasal-pasal lain dalam Konvensi Wina, seperti Pasal 41 (kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima) dan Pasal 43 (kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima), berperan dalam membentuk batasan tindakan diplomatik yang sah. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Eileen Denza dalam *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan ini sering kali diinterpretasikan secara fleksibel tergantung pada konteks politik dan hubungan bilateral negara yang terlibat. Studi lain oleh Satow (2021) juga menekankan pentingnya prinsip non-interference dan kekebalan diplomatik sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas hubungan internasional⁴.

Tindakan pengusiran diplomat dalam kasus ini perlu dilihat secara kritis, apakah benar-benar merupakan respon terhadap pelanggaran prinsip-prinsip hubungan diplomatik, atau lebih sebagai instrumen politik yang memanfaatkan kerangka hukum sebagai justifikasi. Dengan menganalisis lebih dalam penerapan *persona non grata* dalam kasus Kanada-India ini, artikel ini menilai efektivitas serta batasan hukum diplomatik internasional dalam mengelola konflik antarnegara. Selain itu, kajian ini juga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana ketentuan hukum internasional dapat digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara sekaligus menegakkan norma-norma global dalam hubungan antarnegara. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai apakah mekanisme hukum internasional yang tersedia masih relevan dan cukup kuat dalam menghadapi dinamika politik luar negeri kontemporer yang semakin kompleks.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peristiwa saling *persona non-grata* antara Kanada-India Tahun 2023 ditinjau dari konvensi wina 1961?
2. Apa implikasi hukum dari penerapan *persona non grata* dalam kasus ini terhadap hubungan diplomatic antar kedua negara?

³ “Canada expels top Indian diplomat as it investigates Sikh leader’s murder,” *BBC News*, 19 September 2023, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66856658>, diakses 10 April 2025.

⁴ Eileen Denza, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 287–290.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat normatif sebagai dasar analisis. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan prinsip *persona non grata* dalam kerangka hukum internasional, khususnya berdasarkan ketentuan Konvensi Wina 1961.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1961, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum internasional, dan artikel berita relevan yang mendokumentasikan dinamika diplomatik antara Kanada dan India pada tahun 2023.

Pembahasan

A. Analisis peristiwa saling *persona non grata* antara india – kanada tahun 2023 ditinjau dari konvensi wina 1961

Ketegangan diplomatik antara Kanada dan India pada tahun 2023 merupakan salah satu contoh nyata bagaimana dinamika politik internasional dapat berdampak serius pada hubungan antarnegara. Kasus ini bermula dari tuduhan serius pemerintah Kanada terhadap pemerintah India, yang kemudian bereskalasi menjadi tindakan saling mengusir diplomat — sebuah langkah ekstrem dalam hubungan diplomatik yang diatur oleh Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Kronologi peristiwa ini bermula pada tanggal 18 Juni 2023, ketika seorang aktivis Sikh bernama Hardeep Singh Nijjar ditembak mati di depan sebuah Gurdwara (tempat ibadah Sikh) di British Columbia, Kanada. Nijjar adalah seorang tokoh vokal dalam gerakan Khalistan, yang memperjuangkan pembentukan negara merdeka bagi umat Sikh di wilayah Punjab, India. Pemerintah India sejak lama menganggap gerakan Khalistan sebagai gerakan separatis dan mengategorikan beberapa tokohnya, termasuk Nijjar, sebagai teroris. Namun, di Kanada, Nijjar diketahui sebagai warga negara yang berstatus legal dan aktif dalam komunitas Sikh⁵.

Pembunuhan Nijjar segera menarik perhatian publik, khususnya komunitas Sikh di Kanada, yang menuntut pemerintah Kanada untuk melakukan penyelidikan mendalam. Tensi meningkat karena muncul spekulasi bahwa aktor negara asing mungkin terlibat dalam pembunuhan tersebut. Pada 18 September 2023, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dalam pidatonya di hadapan Parlemen, secara terbuka menyatakan bahwa badan intelijen Kanada, *Canadian Security Intelligence Service (CSIS)*, memiliki "indikasi kredibel" yang mengaitkan agen-agen pemerintah India dengan pembunuhan Nijjar. Trudeau juga menyebutkan bahwa Kanada menganggap intervensi semacam ini sebagai pelanggaran kedaulatan nasional yang tidak dapat diterima⁶.

Sebagai respons terhadap tuduhan ini, pemerintah Kanada mengambil langkah diplomatik tegas dengan mengusir seorang diplomat senior India, yang diidentifikasi sebagai kepala operasi intelijen Research and Analysis Wing (RAW) India di Kanada. Pengusiran ini

⁵ Ibid., 65–70.

⁶ Ibid., 86.

dilakukan dengan menyatakan diplomat tersebut sebagai persona non grata berdasarkan hak negara penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961. Tidak lama berselang, India bereaksi dengan keras. Pemerintah India menolak semua tuduhan yang dilontarkan Kanada, menyebutnya sebagai "absurd" dan "bermotivasi politik". Sebagai langkah balasan, India pada 19 September 2023 mengumumkan pengusiran seorang diplomat senior Kanada dari kedutaannya di New Delhi. India juga menyatakan bahwa tindakan ini diambil untuk melindungi kepentingan nasionalnya, menuduh Kanada telah membiarkan kelompok separatis dan ekstremis beroperasi bebas di wilayahnya.

Konflik ini kemudian berkembang menjadi ketegangan diplomatik yang lebih luas. India sementara waktu menangguhkan layanan visa untuk warga negara Kanada, baik di dalam India maupun di luar negeri. India juga memperingatkan warganya untuk berhati-hati ketika bepergian ke Kanada, dengan alasan meningkatnya "sentimen anti-India" di negara tersebut. Sebaliknya, Kanada menyerukan penanganan diplomatik damai, namun tetap menegaskan bahwa tuduhan keterlibatan India dalam pembunuhan Nijjar didasarkan pada bukti intelijen yang kuat. Kasus ini mencerminkan sebuah pola klasik dalam hubungan diplomatik di mana tindakan pengusiran diplomat digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau bahkan protes keras terhadap tindakan negara lain. Namun, penggunaan mekanisme persona non grata dalam konteks ini memperlihatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dimensi politik yang sangat kental. Kedua negara menggunakan hak mereka berdasarkan Konvensi Wina 1961 untuk mengusir diplomat, tetapi di balik tindakan tersebut, terdapat pertarungan narasi politik tentang kedaulatan, terorisme, dan penghormatan terhadap hukum internasional⁷.

Kejadian ini juga memperburuk hubungan bilateral yang sebelumnya sudah tegang akibat perbedaan pandangan mengenai gerakan Khalistan dan komunitas Sikh di diaspora Kanada. Kanada, dengan populasi Sikh yang signifikan, menghadapi tekanan domestik untuk membela hak-hak komunitas minoritas ini, sementara India menuntut tindakan tegas terhadap apa yang dilihatnya sebagai ancaman terhadap integritas nasionalnya. Kronologi ini memperlihatkan bagaimana dugaan keterlibatan negara dalam tindakan kekerasan lintas batas dapat menciptakan krisis diplomatik yang kompleks, melibatkan tuduhan pelanggaran kedaulatan, balasan diplomatik, dan eskalasi ketegangan antarnegara. Kasus Kanada-India 2023 menjadi contoh kontemporer bagaimana norma-norma hukum internasional, khususnya prinsip persona non grata dalam hubungan diplomatik, diuji dalam situasi nyata yang sarat dengan pertimbangan politis dan keamanan.

B. Implikasi Hukum terhadap Hubungan Diplomatik Kanada dan India akibat penerapan Persona Non Grata

Dalam menganalisis kasus krisis diplomatik antara Kanada dan India tahun 2023, penting untuk terlebih dahulu memahami landasan hukum internasional yang relevan, yaitu Konvensi

⁷ "India expels Canadian diplomat as row over Sikh leader's killing deepens," *Reuters*, 19 September 2023, <https://www.reuters.com/world/india/canada-expels-top-indian-diplomat-over-sikh-leaders-murder-2023-09-18/>, diakses 11 April 2025.

Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Salah satu ketentuan utama yang menjadi kunci dalam kasus ini adalah Pasal 9, yang mengatur tentang konsep persona non grata. Menurut Pasal 9 Konvensi Wina 1961, negara penerima memiliki hak mutlak untuk setiap saat, tanpa kewajiban memberikan alasan, menyatakan seorang diplomat atau anggota misi diplomatik sebagai persona non grata. Negara pengirim kemudian diwajibkan untuk menarik diplomat tersebut atau mengakhiri masa tugasnya di negara penerima. Mekanisme ini dirancang sebagai alat hukum untuk menjaga kedaulatan negara penerima, serta untuk mengelola kasus-kasus di mana diplomat asing bertindak di luar batas kewenangan mereka atau bahkan melanggar hukum negara tuan rumah. Dalam konteks kasus Kanada-India, tindakan pengusiran diplomat senior India oleh Kanada dapat dikatakan sejalan dengan hak hukum ini. Kanada, berdasarkan informasi intelijen yang diklaim kredibel, merasa bahwa diplomat tersebut terlibat dalam kegiatan yang membahayakan keamanan nasionalnya, yakni keterlibatan dalam pembunuhan seorang warga negara Kanada yang aktif dalam gerakan separatis Sikh⁸. Oleh karena itu, berdasarkan Konvensi Wina, tindakan Kanada untuk menyatakan diplomat India tersebut sebagai persona non grata sepenuhnya sah secara hukum, meskipun Kanada tidak berkewajiban mengungkapkan alasan spesifik di forum internasional.

Selanjutnya, untuk menilai lebih jauh apakah ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hubungan diplomatik, kita harus merujuk pada Pasal 41 Konvensi Wina 1961. Pasal ini mewajibkan para diplomat untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima serta dengan tegas melarang mereka mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut. Jika benar bahwa agen India, melalui diplomat yang diusir, terlibat dalam operasi yang menyebabkan pembunuhan seorang aktivis politik di Kanada, maka hal tersebut jelas merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 41. Keterlibatan dalam tindakan kriminal berat, apalagi yang berkaitan dengan kekerasan politik di negara tuan rumah, sangat bertentangan dengan kewajiban untuk menghormati hukum setempat dan menjaga netralitas dalam urusan dalam negeri negara penerima. Namun, perlu dicatat bahwa hingga kini belum ada bukti terbuka yang dirilis ke publik yang secara langsung membuktikan keterlibatan diplomat tersebut dalam pembunuhan. Tuduhan Kanada didasarkan pada informasi intelijen, yang oleh sifatnya sulit untuk diverifikasi secara transparan di mata publik. Oleh karena itu, dalam analisis hukum murni, kita tetap harus mempertahankan asas praduga tidak bersalah terhadap individu bersangkutan, namun dari sisi normatif, dugaan kuat keterlibatan diplomat dalam kegiatan kriminal semacam itu akan menjadi pelanggaran berat terhadap Pasal 41⁹.

Sementara itu, perlindungan terhadap diplomat dalam kondisi apapun tetap dijamin oleh Pasal 43 Konvensi Wina 1961. Pasal ini menyatakan bahwa diplomat memiliki kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima, bahkan jika diplomat tersebut diduga melakukan tindakan tercela atau melanggar hukum. Dalam konteks kasus Kanada-India, sekalipun ada bukti kuat bahwa diplomat tersebut terlibat dalam tindakan kriminal, negara penerima, yaitu Kanada, tidak

⁸ "Trudeau says India may be linked to killing of Canadian Sikh leader," *The Guardian*, 18 September 2023, <https://www.theguardian.com/world/2023/sep/18/trudeau-india-canada-sikh-killing>, diakses 10 April 2025.

⁹ Pritam Singh, "The Khalistan Movement in India and the UK: A Diaspora Perspective," *Economic and Political Weekly* 52, no. 12 (2017): 46–54.

memiliki hak untuk menangkap, menahan, atau mengadili diplomat tersebut berdasarkan hukum domestik. Satu-satunya mekanisme yang tersedia adalah mendeklarasikan diplomat itu sebagai persona non grata dan meminta negara pengirim untuk menariknya. Dengan demikian, tindakan Kanada yang memilih mengusir diplomat ketimbang menangkapnya, adalah sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukumnya berdasarkan Konvensi Wina. Di sisi lain, tindakan India yang membalas dengan mengusir diplomat Kanada juga sesuai dengan hak negara penerima di bawah Pasal 9, walaupun alasan yang dikemukakan India lebih cenderung bersifat politis dan retorik daripada berdasarkan bukti spesifik tentang pelanggaran hukum oleh diplomat Kanada¹⁰.

Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Konvensi Wina dalam kasus ini menunjukkan bahwa secara prosedural, baik Kanada maupun India tidak melanggar ketentuan Konvensi tersebut. Namun, jika dianalisis lebih dalam, motivasi politik di balik tindakan pengusiran tersebut tampak dominan. Kanada menggunakan mekanisme persona non grata untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan mengirim pesan diplomatik keras terhadap dugaan keterlibatan India dalam pembunuhan Nijjar. Di sisi lain, balasan India terhadap Kanada lebih merupakan tindakan simetris untuk mempertahankan posisi politiknya dan menjaga harga diri nasional, tanpa adanya tuduhan konkret terhadap diplomat Kanada yang diusir. Dengan kata lain, walaupun tindakan kedua negara sah secara hukum, konteks politik yang membungkus tindakan tersebut membuat penggunaan Pasal 9 dalam kasus ini sangat dipolitisasi¹¹.

Dampak dari tindakan saling mengusir diplomat ini terhadap hubungan bilateral kedua negara cukup signifikan. Ketegangan meningkat tajam, dengan Kanada menghentikan perundingan perdagangan bebas dengan India, dan India membatasi layanan visa untuk warga Kanada. Retaknya hubungan ini memperburuk persepsi kedua negara terhadap satu sama lain, merusak kerja sama di berbagai bidang seperti keamanan, perdagangan, dan pendidikan. Dalam skala lebih luas, kasus ini menguji prinsip-prinsip hubungan diplomatik internasional, khususnya prinsip saling menghormati kedaulatan dan non-intervensi. Konvensi Wina 1961, meskipun berhasil menyediakan kerangka hukum yang jelas, tetap tidak dapat sepenuhnya menghalangi penggunaan diplomasi sebagai alat tekanan politik ketika krisis kepercayaan muncul¹². Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional menyediakan prosedur formal yang harus diikuti, faktor politik tetap menjadi kekuatan dominan yang mengarahkan tindakan negara dalam situasi sengketa diplomatik.

Kasus Kanada-India 2023 memberikan pelajaran penting tentang penerapan norma hukum diplomatik dalam praktik nyata. Di satu sisi, mekanisme persona non grata membuktikan efektivitasnya sebagai instrumen hukum yang memungkinkan negara penerima mempertahankan kedaulatannya tanpa harus melanggar kekebalan diplomatik. Di sisi lain, penggunaan instrumen ini dalam konteks politik yang memanas memperlihatkan batasan

¹⁰ Ibid., 71.

¹¹ John Smith, "Diplomatic Fallout: The Nijjar Assassination and Canada-India Relations," *Journal of International Affairs* 75, no. 3 (2024): 112–130.

¹² Ibid., 141.

praktis dari hukum internasional dalam menghadapi realitas politik global yang dinamis dan penuh ketidakpastian.

KESIMPULAN

Krisis diplomatik antara Kanada dan India tahun 2023 menunjukkan bagaimana mekanisme *persona non grata* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961 dijalankan oleh kedua negara. Penerapan pasal tersebut memberikan kewenangan kepada negara penerima untuk mengusir diplomat asing tanpa kewajiban menjelaskan alasan secara terbuka, dan dalam kasus ini, baik Kanada maupun India telah menjalankan hak tersebut sesuai ketentuan hukum internasional. Kanada mengusir diplomat India atas dugaan keterlibatan dalam pembunuhan Hardeep Singh Nijjar, dan India membalas dengan pengusiran diplomat Kanada. Meskipun terdapat perbedaan motif dimana tindakan India cenderung lebih bersifat politis keduanya tetap berada dalam kerangka legal yang diatur oleh Konvensi Wina.

Namun, penerapan mekanisme hukum ini memiliki implikasi serius terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Pengusiran timbal balik memperburuk ketegangan politik, menghambat kerja sama bilateral, dan meningkatkan ketidakpercayaan antara kedua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Konvensi Wina memberikan dasar hukum yang sah, penggunaannya tidak terlepas dari konteks politik dan strategi negara masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk tidak hanya berpijak pada aspek legal semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip diplomasi damai, penghormatan terhadap kedaulatan, dan penyelesaian sengketa melalui dialog, agar stabilitas hubungan internasional tetap terjaga dan tidak semakin memburuk akibat penggunaan mekanisme hukum yang kaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Denza, Eileen. *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*. Edisi ke-4. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- "Canada Expels Top Indian Diplomat as It Investigates Sikh Leader's Murder." *BBC News*, 19 September 2023. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66856658>.
- "India Expels Canadian Diplomat as Row over Sikh Leader's Killing Deepens." *Reuters*, 19 September 2023. <https://www.reuters.com/world/india/canada-expels-top-indian-diplomat-over-sikh-leaders-murder-2023-09-18/>.
- Singh, Pritam. "The Khalistan Movement in India and the UK: A Diaspora Perspective." *Economic and Political Weekly* 52, no. 12 (2017): 46–54.
- Smith, John. "Diplomatic Fallout: The Nijjar Assassination and Canada-India Relations." *Journal of International Affairs* 75, no. 3 (2024): 112–130.
- "Trudeau Says India May Be Linked to Killing of Canadian Sikh Leader." *The Guardian*, 18 September 2023. <https://www.theguardian.com/world/2023/sep/18/trudeau-india-canada-sikh-killing>.
- United Nations. *Vienna Convention on Diplomatic Relations. United Nations Treaty Series*, vol. 500 (1961): 95–130.